

# DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN LINGKUNGAN, K3 DAN PERSYARATAN LAIN

## PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

NO	PERATURAN PERUNDANGAN	TENTANG	KATAGORI
<b>1. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			L
1	Undang-undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	L
2	Undang-undang No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	L
3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2012	Keanekaragaman Hayati	L
4	Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	L
<b>2. PENGELOLAAN SAMPAH</b>			L
1	Undang-undang No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah	L
2	Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	L
3	Peraturan Menteri Lingkungan No. 13 Tahun 2012	Reduce, Reuse, and Recycle	L
4	Peraturan Daerah Cimahi No.6 tahun 2019	Reduce, Reuse, and Recycle	L
<b>3. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN UDARA</b>			L
1	Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992	Pengesahan Vienna Convention for The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of Parties London, 27-29 June 1990	L
2	Undang-undang No. 17 Tahun 2004	Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Ratification of Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change)	L
3	Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2005	Pengesahan Beijing Amandment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Beijing atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon)	L
4	Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2005	Pengesahan Montreal Amandment to The Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer (Amandemen Montreal atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang merusak Lapisan Ozon)	L
5	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara	L
6	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996	Baku Tingkat Kebisingan	L
7	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006	Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama	L
8	Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 Tahun 2014	Larangan Penggunaan HCFC di Bidang Perindustrian	L
9	Permen LHK No 6 Tahun 2018	Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi PPU	L
10	Permen LH no 7 Tahun 2007	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap	L
11	Permen LHK no 11 Tahun 2021	Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Genset)	L
12	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 1995	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	L
13	UU no 16 Tahun 2016	Pengesahan Paris Agreement	L
<b>4. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AIR</b>			L
1	Undang-undang No. 17 Tahun 2019	Sumber Daya Air	L
2	Peraturan Pemerintah No 43 2008	Air Tanah	L
3	Peraturan Pemerintah No 42 2008	Pengelolaan Sumber Daya Air	L
4	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	L

5	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003	Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	L
6	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009	Pemanfaatan Air Hujan	L
7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun	Baku Mutu Air Limbah	L
8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 68 Tahun 2016	Baku Mutu Air Limbah Domestik	L
<b>5. PENGELOLAAN B3</b>			L
1	Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun	L
2	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008	Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label B3	L
3	Peraturan Menteri Perindustrian No. 23 Tahun 2013	Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 87 Tahun 2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia	L
4	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187 Tahun 1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja	L / K3
<b>6. PENGELOLAAN LIMBAH B3 dan Non B3</b>			L
1	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021	Pengelolaan Limbah B3	L
2	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 01 Tahun 1995	Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	L
3	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 02 Tahun 1995	Dokumen Limbah B3	L
4	Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255 Tahun 1996	Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas	L
5	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009	Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3	L
6	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013	Simbol dan Label Limbah B3	L
7	Permen LHK No 6 Tahun 2021	Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3	L
8	Permen LHK No 19 Tahun 2021	Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3	L
<b>7. PERIZINAN, AUDIT, PENILAIAN, PELAPORAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP</b>			L
1	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan	L
2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	L
3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013	Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan	L
4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009	Laboratorium Lingkungan	L
5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 87 Tahun 2016	SIMPEL	L
6	Permen LHK No 5 Tahun 2021	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	L
7	Permen LHK No 1 Tahun 2021	PROPER	L
<b>8. LINGKUNGAN KERJA DAN ALAT KESELAMATAN</b>			L
1	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2011	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja	L / K3
2	Peraturan Menteri Perburuahan No. 07 Tahun 1964	Syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan di tempat kerja	L / K3
3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1980	Syarat-syarat pemasangan & pemeliharaan APAR	L / K3
4	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 08 Tahun 2010	Alat pelindung Diri	L / K3
5	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996	Baku Tingkat Getaran	L
<b>9. ENERGI</b>			L
1	Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012	Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak	L
2	Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2013	Penghematan Pemakaian Listrik	L
3	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007	Energy	L
4	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009	Energy Conservation	L
<b>10. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</b>			L

1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2012	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan	L
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2004	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	L
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2008	Pengelolaan Air Tanah	L
4	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2006	Pengendalian Pencemaran Udara	L
5	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 23 Tahun 2012	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat	L
<b>11. PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>			L
1	Kepmenaker No KEP.186/MEN/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	L / K3
<b>12. KEUANGAN BERKELANJUTAN</b>			L
1	POJK NO 51 POJK.03/2017	Penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik	L
<b>13. KETENAGAKERJAAN</b>			K3
1	UU No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan	K3
2	UU No 11 Tahun 2020	Cipta Kerja	K3
<b>14. KESELAMATAN KERJA</b>			K3
1	UU No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja	K3
<b>15. KESEHATAN KERJA</b>			K3
1	Permenaker No 2 Tahun 1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja	K3
2	Permenaker No 3 Tahun 1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	K3
3	PP No 88 Tahun 2019	Kesehatan Kerja	K3
4	Perpres No 7 Tahun 2019	Penyakit Akibat Kerja	K3
<b>16. SYSTEM MANAGEMENT K3</b>			K3
1	Kepmenaker No 1135 Tahun 1987	Bendera K3	K3
2	Kepmenaker No 24 Tahun 1990	Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional	K3
3	PP No 50 Tahun 2012	Penerapan System Management K3	K3
<b>17. LINGKUNGAN KERJA</b>			K3
1	Permenaker No 5 Tahun 2018	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	K3
<b>18. ALAT K3</b>			K3
1	Permenaker No 37 Tahun 2016	Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	K3
2	Permenaker No 38 Tahun 2016	Pesawat Tenaga dan Produksi	K3
3	Permenaker No 6 Tahun 2017	Elevator dan Eskalator	K3
4	Permenaker No 8 Tahun 2020	Pesawat Angkat dan Angkut	K3
<b>19. K3 PADA PEKERJAAN TERTENTU</b>			K3
1	Permenaker No 1 Tahun 1980	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan	K3
2	Permenaker No 3 Tahun 1985	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Asbes	K3
3	Kepmenaker No 68 Tahun 2004	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja	K3
4	Kep Dirjen No 20 Tahun 2005	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di tempat	K3
5	Permenaker No 11 Tahun 2005	Pencegahan Penanggulangan Penggunaan dan Peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif lainnya di Tempat Kerja	K3
6	Kep Dirjen No 45 Tahun 2008	Pedoman K3 bekerja pada ketinggian dengan menggunakan akses tali	K3
1	Permen ESDM No 36 Tahun 2014	Pemberlakuan SNI 0225 Tahun 2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik	K3
2	Permenaker No 12 Tahun 2015	K3 Listrik di Tempat Kerja	K3
3	Permenaker No 33 Tahun 2015	Perubahan Atas Permenaker No 12 Tahun 2015 (K3 Listrik ditempat kerja)	K3
4	Permenaker No 9 Tahun 2016	K3 Pada Pekerjaan Ketinggian	K3
<b>20. KOMPETENSI TENAGA KERJA</b>			K3
1	Permenaker No 4 Tahun 1987	P2K3 dan Tata Cara Penunjukan ahli K3	K3
2	Permenaker No 1 Tahun 1988	Kualifikasi dan Syarat Syarat Operator Pesawat Uap	K3
3	Permenaker No 2 Tahun 1992	Tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3	K3
4	Kep Dirjen No 407 Tahun 1999	Persyaratan Penunjukan Hak dan Kewajiban Teknisi Lift	K3
5	Kep Dirjen No 311 Tahun 2002	Sertifikasi Kompetensi K3 Teknisi Listrik	K3
6	Kep Dirjen No 69 Tahun 2015	Pedoman Pembinaan Calon Ahli K3 Umum	K3
<b>21. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>			K3
1	Instruksi Menaker No 11 Tahun 1997	Pengawasan khusus K3 Penanggulangan Kebakaran	K3
2	Permenaker No 2 Tahun 1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir	K3
3	Permenaker No 31 Tahun 2015	Perubahan terhadap Permenaker No 2 Tahun 1989 (Penyalur Petir)	K3
<b>22. LAPORAN K3</b>			K3
1	Permenaker No 1 Tahun 1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	K3
2	Permenaker No 3 Tahun 1998	Tata cara pelaporan pemeriksaan kecelakaan	K3

			K3
<b>23. PENANGGULANGAN K3</b>			K3
1	Permenaker No 4 Tahun 1980	Syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR	K3
2	UU No 40 Tahun 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional	K3
3	Permenaker No 15 Tahun 2008	Pertolongan pertama pada Kecelakaan di tempat kerja	K3
4	Kepmenaker No 609 Tahun 2012	Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	K3
5	PP No 44 Tahun 2015	Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	K3
6	Permenaker No 10 Tahun 2016	Tata cara pemberian Program Kembali Kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	K3
7	PP No 82 Tahun 2019	Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	K3

**KETERANGAN KATEGORI :**

L. LINGKUNGAN

K3. KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA